

## Indonesia mengindikasikan rencana yang berpotensi menanggalkan taksonomi berbasis sains.

[Christina Ng, Putra Adhiguna](#)

Minggu lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengindikasikan sebuah rencana untuk menyertakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara dalam taksonomi hijau Indonesia. Hal ini tampak sebagai langkah tambahan dari kabar sebelumnya mengenai rencana mengkategorikan PLTU yang ditargetkan untuk pemensiunan dini dengan label hijau. Langkah putar baik tersebut tidak hanya menandakan perubahan arah angin dari posisi yang ditampilkan Indonesia tahun lalu, namun bila diteruskan juga berpotensi meletakkan Indonesia di klasemen terbawah dunia dalam standar taksonomi hijau dan keuangan berkelanjutan.

Taksonomi hijau Indonesia yang diterbitkan di Januari 2022 patut diapresiasi dengan batasan penyematan label hijau yang tegas pada kegiatan yang berkaitan dengan energi terbarukan. Taksonomi tersebut menggunakan sistem *traffic light* untuk mendefinisikan kegiatan menurut tingkat keberlanjutan: hijau untuk aktivitas yang melindungi atau memperbaiki lingkungan, kuning untuk kegiatan yang tidak menyebabkan kerusakan yang signifikan pada lingkungan, dan merah untuk kegiatan yang *merusak lingkungan*.

Kabar yang tengah bergulir sangatlah mengkhawatirkan karena PLTU batubara dapat dianggap sebagai kegiatan yang melindungi atau memperbaiki lingkungan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan berbagai pertimbangan berbasis sains yang diakui dunia.

Yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah bahwa alasan penyebutan PLTU tertentu sebagai hijau adalah bila kegiatan tersebut akan diperlukan “untuk tujuan transisi energi”.

Rencana tersebut mengirimkan sinyal yang buruk bagi investor global yang semakin berfokus pada aspek keberlanjutan dan negara-negara rekanan yang mengharapkan kepastian kebijakan di Indonesia serta keseriusannya dalam bertransisi menuju masa depan dengan energi bersih.

### **Resiko *greenwashing* yang semakin menguat**

Sebuah berita di tanggal 29 Agustus mengindikasikan bahwa OJK berencana meninjau kembali taksonomi hijau Indonesia untuk mengklasifikasikan PLTU baru tertentu dengan label hijau bila kegiatannya untuk tujuan transisi energi, misalnya bila PLTU tersebut ditujukan untuk sumber energi proyek smelter.

Saat ini taksonomi hijau Indonesia mengkategorikan PLTU dengan label kegiatan kuning atau merah.

Taksonomi tersebut merupakan satu dari setidaknya sepuluh taksonomi hijau dan keuangan berkelanjutan lainnya yang telah diterbitkan di dunia. Tidak satupun mengkategorikan PLTU dengan label hijau.

Taksonomi Uni Eropa (EU) untuk kegiatan berkelanjutan tidak menyertakan batubara. Bahkan negara seperti China dan Rusia, di mana batubara masih hadir dengan kuat disertai PLTU yang tengah dalam pembangunan, juga tidak menyertakan pembangkit listrik berbasis batubara dan gas dari taksonomi hijau mereka.

Taksonomi hijau pertama China yang diterbitkan di tahun 2015 pernah mengkategorikan aktivitas "*clean coal*" sebagai proyek yang dapat mendapatkan pendanaan hijau, namun mendapatkan kritik keras, terlebih dari komunitas investor internasional.

China pun merespon dan mendukung pentingnya kehadiran taksonomi yang benar-benar hijau. Di pertengahan tahun 2021 mereka menyingkirkan kegiatan yang berkaitan dengan bahan bakar fosil dari daftar tersebut. Saat ini taksonomi hijau China tidak lagi menyertakan kegiatan yang berkaitan dengan gas, gas cair (LNG) dan PLTU di dalamnya.

Sebelum pemberitaan minggu lalu, telah ada kabar bahwa Indonesia berencana memberikan label hijau pada PLTU yang menjadi target kegiatan pemensiunan dini. Hal tersebut juga untuk menyelaraskan dengan Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan versi 2.0 yang ada. Sekiranya Indonesia memutuskan melanjutkan rencana perubahan kategori PLTU tertentu (misalnya: *captive power plant*) menjadi hijau dengan beralasan untuk tujuan transisi energi, maka taksonomi hijau Indonesia akan menjadi taksonomi pertama di dunia yang mengkategorikan kegiatan batubara dengan label hijau. Hal tersebut bukan hanya akan menurunkan kredibilitas nasional dan melainkan juga mendekati batasan di mana negara akan memberikan kemudahan melakukan greenwashing.

### **Pukulan bagi kepercayaan investor internasional**

Topik taksonomi kerap kali menjadi bahan perhatian dunia, dan cukup sering mengundang sentimen negatif.

Sebuah kontroversi besar terjadi tahun lalu ketika EU memberikan label pembangkit listrik berbahan bakar gas sebagai kegiatan sustainable. Gas dipromosikan sebagai energi yang lebih bersih dibanding batubara dan diperlukan selagi EU meningkatkan kapasitas energi terbarukan mereka.

Respon negatif dari investor internasional datang dengan cepat. Insitusi keuangan dengan *asset under management* lebih dari €50 triliun mengkritik keras kebijakan Komisi Eropa yang melemahkan taksonomi EU untuk mengakomodir kepentingan dari beberapa negara anggota dan juga dari industri gas.

OJK perlu menyadari bahwa PLTU tidak perlu dilabeli "hijau" untuk mendapatkan pendanaan. Membatasi pelabelan hijau tidak dengan serta merta menanggalkan akses PLTU terhadap pendanaan konvensional. Justru dengan menyematkan label sustainable pada investasi PLTU akan mengirimkan sinyal yang membingungkan bagi investor yang memerlukan kepastian bahwa aset mereka selaras dengan standar dunia, dan membuat mereka perlu melakukan *due diligence* tambahan, yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya transaksi. Hal ini membuat Indonesia beresiko kehilangan akses terhadap *foreign direct investment* berkualitas dan juga menjadikan taksonomi hijau Indonesia tidak efektif.

Rencana dari OJK tersebut juga beresiko membuat reputasi institusi keuangan domestik menjadi sorotan bila mereka secara serta merta mendukung investasi PLTU hanya dengan berlandaskan pada 'penghijauan' label kegiatan tersebut di dalam taksonomi. Komitmen para institusi tersebut dalam penurunan emisi akan kembali dipertanyakan, yang juga akan menurunkan reputasi dan relevansi mereka di kancah dunia.

### **Memperkeruh definisi investasi hijau atas nama transisi energi bukan langkah bijak**

OJK seolah menganggap bahwa sebuah kegiatan dapat dilabeli hijau bila kegiatan tersebut penting bagi perkembangan ekonomi. Namun, hal tersebut beresiko menciptakan kebingungan antara kebutuhan untuk bertransisi dengan kejelasan dan kepastian yang dibutuhkan investor bahwa taksonomi yang Indonesia miliki ditopang oleh basis sains yang kuat.

Investor internasional akan memandang penyematan label "hijau" pada investasi bahan bakar fosil sebagai langkah yang tidak beralasan, meskipun proyek tersebut memiliki peran dalam masa transisi.

Indonesia tentunya akan dapat terus melangkah dalam transisi energinya tanpa perlu mempertaruhkan kredibilitasnya di pasar keuangan dunia.